

ABSTRAK

IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DAN KEADILAN DALAM PENGLEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM (Studi Kasus Penglepasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Gedebage Bandung), YADI SURYADI, TESIS

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, dan tanahnya selanjutnya dimiliki oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Badan Hukum Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak. Penglepasan hak itu sendiri bisa berupa jual beli, penyerahan, hibah atau pencabutan. Khusus penglepasan yang berlaku untuk pengadaan tanah dalam arti penyerahan dengan imbalan ganti rugi, atau penglepasan hak sepihak dengan pencabutan hak yang dilakukan oleh pemerintah.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *sosio-legal research*. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan sumber data diperoleh melalui: studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam ini adalah deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa setiap dibutuhkan pengadaan tanah yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, kiranya perlu dilaksanakan asas keseimbangan dan keadilan dalam penglepasan hak atas tanah. Terdapat beberapa permasalahan dalam penglepasan hak atas tanah untuk pembangunan jalan tol Gedebage Bandung, dikarenakan dari faktor internal yang berasal dari dalam pelaku pembebasan

memenuhi asas keseimbangan dan keadilan. Hal ini dapat dilihat pada proses pemberian ganti rugi kepada pemilik yang tidak mengalami kendala ataupun permasalahan yang berarti. Sebagian warga justru merasa mendapatkan keuntungan karena nilai penggantian yang diberikan oleh pihak pemerintah justru menambah investasi tanah yang dimiliki.

Keywords : Pengelepasan Hak Atas Tanah, Ganti Rugi serta Keseimbangan Keadilan

ABSTRACT

***IMPLEMENTATION OF PRINCIPLES AND JUSTICE IN THE BALANCE
penglepasan DEVELOPMENT OF LAND FOR PUBLIC FACILITIES (Case
Study penglepasan Land For Highway Development Gedebage
Bandung), Yadi Suryadi, Thesis***

Land acquisition is the activity of providing the ground by way of compensating losses decent and fair to the parties entitled, and the land will be owned by the Government or Local Government, State Owned Legal Entity or State Owned concerned. According to Presidential Regulation No. 71 Year 2012 is described in Article 1 paragraph 2 that the land acquisition is the activity of providing ground by giving proper compensation and fair to the Entitled Party. Penglepasan right itself could be a purchase, assignment, grant or revocation. Penglepasan specifically applicable to land acquisition in the sense of surrender in return for compensation, or the release of a unilateral right to disenfranchisement by the government.

Methods empirically in this study using the research approach of socio-legal research. Specifications analytical descriptive study. The type of data used are primary data and secondary data, while the data source is obtained through: literature studies and field studies. Data analysis techniques are used in the descriptive analysis.

Based on the research results it can be argued that any required procurement of land used for the construction of public facilities, would need to be implemented the principle of balance and fairness in the release of land rights. There are some minor problems in the release of land rights for the construction of toll roads Gedebage Bandung, because of internal factors derived from the perpetrator land acquisition for development purposes, namely: government, community land rights holders and project implementers / applicant liberation. While external factors dipenaruhi by outsiders, namely someone who went along to affect the process of land acquisition (realtor). The process of payment of compensation to residents whose land rights have been released for the construction of toll roads Gedebage Bandung has met the principle of balance and fairness. This can be seen in the process of granting compensation to the owner who did not experience significant problems or obstacles. Some people just feel benefit because replacement